

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata total pendapatan kotor rumah tangga petani di Desa Kalitinggar mencapai Rp32.553.621,- per tahun, dengan rata-rata kebutuhan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp30.167.240,- dan rata-rata pendapatan bersih adalah sebesar Rp2.386.381,-.
2. Struktur dan distribusi pendapatan rumah tangga petani di Desa Kalitinggar yaitu:
 - a. Distribusi pendapatan pada daerah penelitian tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya tergolong rendah (0,20 sampai 0,35) yaitu dengan angka koefisien Gini sebesar 0,30. Berdasarkan kurva Lorenz tergolong rendah, dimana kurva Lorenz sedikit melengkung (cembung) dari garis pemerataan. Menurut metode kriteria Bank Dunia yang mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan pada daerah penelitian dalam kategori ketimpangan rendah (*low inequality*) yaitu lebih dari 17 persen total pendapatan seluruh petani. Persentase distribusi pendapatan pada daerah penelitian yaitu sebesar 18,40%.

- b. Nilai persentase tertinggi rumah tangga petani di Desa Kalitenggar memiliki struktur pendapatan yang berasal dari pekerjaan sektor *on farm*, *off farm*, *non farm*, yaitu sebesar 60%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, untuk kemajuan pendapatan petani di Desa Kalitenggar maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan struktur pendapatan menunjukkan bahwa persentase tertinggi berasal dari *on farm*, *off farm* dan *non farm* sehingga perlu terus dioptimalkan secara kualitas dan kuantitas.
2. Berdasarkan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa petani di Desa Kalitenggar termasuk pada tingkat ketimpangan, namun sangat rendah, tetapi tetap perlu adanya usaha peningkatan pendapatan melalui perluasan areal tanam, usaha diluar usahatani serta campur tangan pemerintah dalam rangka menyediakan modal usaha.
3. Pemerintah daerah perlu menciptakan pemantauan kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi dengan perencanaan dan pemantauan pembangunan, pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan pengambilan keputusan serta pemantauan ini harus memungkinkan pengambil kebijakan untuk dapat mendukung rumah tangga miskin agar memiliki peluang (*opportunity*) untuk secara terus menerus (*sustainable*) memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan (*vulnerable*).